

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebakaran gedung merupakan salah satu keadaan darurat yang berpotensi menimbulkan dampak besar, baik terhadap keselamatan jiwa, kerusakan aset, terganggunya layanan publik, hingga kerugian sosial dan ekonomi. Risiko kebakaran pada bangunan gedung dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik bangunan (luas, tinggi, jumlah lantai, tata ruang), fungsi dan intensitas aktivitas (jumlah penghuni dan pengunjung), sistem utilitas (listrik, AC, genset), material interior, serta kualitas sistem proteksi kebakaran dan manajemen tanggap darurat (Islam Makassar, 2025). Pada bangunan perkantoran pemerintahan, risiko tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena aktivitas pelayanan publik berlangsung setiap hari, melibatkan mobilitas pegawai dan masyarakat, serta menampung dokumen dan peralatan penting yang menunjang keberlangsungan pemerintahan (Lamury, 2024).

Gedung Walikota Jakarta Utara sebagai salah satu pusat penyelenggaraan pelayanan publik memiliki tingkat hunian dan aktivitas yang dinamis (Prima Naomi et al., 2019). Gedung ini berpotensi menghadapi berbagai sumber bahaya kebakaran, misalnya dari instalasi listrik, panel distribusi, peralatan elektronik, ruang arsip, ruang *server*/telekomunikasi, *pantry*, penggunaan bahan mudah terbakar, hingga potensi hambatan evakuasi akibat kepadatan aktivitas atau tata letak ruang. Selain itu, kompleksitas organisasi di gedung pemerintahan sering kali menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana prasarana seperti APAR, *hydrant*, detektor, *alarm*, tetapi juga pada aspek manajerial seperti prosedur keadaan darurat, pelatihan, simulasi, penugasan peran, serta koordinasi internal dan eksternal seperti dengan dinas pemadam kebakaran (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013).

Sisi lokal Gedung Wali Kota Jakarta Utara terlihat dari keterikatannya dengan karakter wilayah Jakarta Utara sebagai kawasan pesisir, pelabuhan, dan gerbang maritim Jakarta. Gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga merepresentasikan identitas lokal Jakarta Utara yang

dekat dengan aktivitas laut, pelabuhan, dan kawasan strategis Tanjung Priok. Secara historis, Gedung Wali Kota Jakarta Utara telah berdiri sejak pembangunan awal pada tahun 1997 dan kemudian mengalami renovasi pada tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan, kenyamanan, dan fungsi bangunan pemerintahan yang lebih modern. Perbedaannya dengan gedung wali kota lain dapat dilihat dari konteks lokal bangunannya, yaitu berada pada wilayah pesisir yang memiliki karakter maritim kuat, serta memiliki fungsi publik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi ruang pelayanan dan aktivitas masyarakat (Fajrini, 2019). Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal, Gedung Wali Kota Jakarta Utara belum memiliki SOP kebakaran serta struktur manajemen kebakaran gedung yang terdokumentasi secara jelas. Kondisi ini menjadi aspek penting yang membedakannya dalam kajian keselamatan bangunan, karena meskipun gedung telah mengalami renovasi, sistem pengelolaan keselamatan kebakaran secara organisasi masih perlu diperkuat melalui penyusunan SOP, pembentukan struktur manajemen kebakaran gedung, pembagian tugas petugas darurat, serta mekanisme evakuasi yang lebih terarah.

Menurut Rajab (2024), dalam konteks keselamatan kebakaran gedung, “kesiapan” dapat dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya elemen pencegahan, deteksi dini, pemadaman awal, penyelamatan/evakuasi, serta respons darurat yang terencana dan teruji. Penilaian kesiapan idealnya dilakukan secara sistematis melalui penetapan konteks dan karakteristik gedung, kajian eksisting seperti kondisi aktual sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta sarana penyelamatan, identifikasi bahaya dan penilaian risiko menggunakan matriks risiko, hingga pemetaan tingkat kesiapan pada area-area gedung untuk memperoleh gambaran spasial yang lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi kesiapsiagaan kebakaran, tingkat risiko kebakaran pada berbagai area, serta rekomendasi perbaikan. Penelitian ini juga diarahkan menghasilkan dokumen seperti *fire assignment* yaitu pembagian peran dan tanggung jawab kebakaran, sehingga aspek manajemen kedaruratan dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Dengan pendekatan deskriptif evaluatif, penelitian diharapkan mampu mendeskripsikan kondisi eksisting sekaligus menganalisis

tingkat risiko dan kesiapan secara terukur, sebagai dasar peningkatan keselamatan kebakaran gedung.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Belum adanya gambaran jelas terkait konteks dan karakteristik Gedung Walikota Jakarta Utara yang berpengaruh terhadap keselamatan kebakaran.
2. Perlu dilakukannya kajian terhadap kondisi eksisting kesiapan kebakaran, mencakup Manajemen/Organisasi, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Peraturan, serta Sarana dan Prasarana.
3. Belum diketahui secara terukur bahaya kebakaran yang dominan pada area-area tertentu seperti ruang listrik, arsip, *server*, *pantry*, ruang kerja beserta tingkat risikonya.
4. Dibutuhkannya penilaian risiko menggunakan matriks risiko untuk menentukan prioritas pengendalian dan peningkatan kesiapan.
5. Belum tersedianya peta kesiapan kebakaran yang dapat menunjukkan variasi tingkat kesiapan antar area/lantai sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
6. Perlunya penyusunan *fire assignment* agar pembagian peran dan alur komando pada kondisi darurat kebakaran jelas, terlatih, dan dapat diimplementasikan.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka pembatasan masalah dalam skripsi ini meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada aspek manajemen/organisasi, sumber daya manusia, regulasi/peraturan, serta sarana dan prasarana. Tanpa membahas mengenai pengujian laboratorium terhadap material bangunan, pemodelan perkembangan api dan asap, perhitungan struktur tahan api, maupun pembahasan keadaan darurat non-kebakaran seperti gempa bumi, banjir, kerusakan, dan ancaman keamanan lainnya.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konteks dan karakteristik Gedung Walikota Jakarta Utara yang memengaruhi keselamatan dan kesiapsiagaan kebakaran?
2. Bagaimana kondisi eksisting kesiapan kebakaran gedung ditinjau dari Manajemen/Organisasi, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Peraturan, serta Sarana dan Prasarana?
3. Bahaya kebakaran apa saja yang terdapat pada area-area gedung dan bagaimana tingkat risikonya berdasarkan penilaian matriks risiko?
4. Bagaimana hasil pemetaan tingkat kesiapan kebakaran pada area/lantai Gedung Walikota Jakarta Utara?
5. Bagaimana rancangan *fire assignment* yang sesuai dengan kebutuhan gedung berdasarkan hasil analisis risiko dan tingkat kesiapan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mendeskripsikan konteks serta karakteristik gedung yang relevan terhadap keselamatan kebakaran.
2. Mengkaji kondisi eksisting kesiapan kebakaran dari Manajemen/Organisasi, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Peraturan, serta Sarana dan Prasarana.
3. Mengidentifikasi bahaya kebakaran pada berbagai area dan melakukan penilaian risiko menggunakan matriks risiko.
4. Menyusun peta kesiapan kebakaran gedung untuk menggambarkan tingkat kesiapan pada area/lantai.
5. Menyusun dokumen rekomendasi berupa *fire assignment* sebagai pedoman pembagian peran dan tanggung jawab saat keadaan darurat kebakaran.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi Universitas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan referensi akademik di lingkungan universitas, khususnya

pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manajemen risiko, serta keselamatan kebakaran gedung. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran berbasis kasus nyata (*case-based learning*), rujukan untuk pengembangan penelitian sejenis, serta memperkuat peran universitas dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan kebutuhan keselamatan bangunan publik. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong peningkatan kolaborasi antara universitas dengan instansi pemerintah melalui kajian-kajian terapan yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.

Manfaat bagi Instansi. Bagi instansi pengelola Gedung Walikota Jakarta Utara, penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai tingkat kesiapan kebakaran gedung dan profil risiko kebakaran pada area-area tertentu berdasarkan identifikasi bahaya dan penilaian matriks risiko. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas perbaikan, baik pada aspek proteksi kebakaran aktif dan pasif, sarana penyelamatan/evakuasi, maupun penguatan manajemen tanggap darurat. Dokumen seperti peta kesiapan kebakaran dan *fire assignment* juga dapat membantu instansi dalam memperjelas pembagian peran, alur komando, dan prosedur respons darurat sehingga penanganan kejadian kebakaran dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi.

Manfaat bagi Peneliti. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana penerapan dan penguatan kompetensi dalam melakukan analisis deskriptif evaluatif terkait keselamatan kebakaran gedung, mulai dari penetapan konteks, kajian eksisting, identifikasi bahaya, hingga penilaian risiko dan pemetaan tingkat kesiapan. Peneliti memperoleh pengalaman dalam menyusun instrumen penilaian, mengolah data lapangan, serta mengintegrasikan hasil analisis menjadi rekomendasi yang aplikatif seperti *fire assignment*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi portofolio akademik dan pijakan untuk penelitian lanjutan, baik pada objek gedung lain maupun pada pengembangan metode evaluasi kesiapsiagaan kebakaran yang lebih mendalam.